

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris*. Bogor, Azkiya Publishing.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia. BPS: Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 2017. Pendapatan Nasional Indonesia. ID : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun. 2020. Kabupaten Sarolangun Dalam Angka. Sarolangun: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. 2019. Provinsi Jambi Dalam Angka. Jambi (ID): Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Sarolangun. Sarolangun: Badan Pusat Statistik.
- BAPPEDA Provinsi Jambi. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. BAPPEDA: Provinsi Jambi.
- Darman. 2016. Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Haluoleo.
- Dewi JK dan Budhi MKS. 2018. Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzan AW. 2015. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- FWI/GFW (*Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch*). 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia. FWI dan GFW: Bogor.
- Hendra. 2016. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Makanan Di Provinsi Lampung. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.

- Horota P, Riani IAP dan Marbun RM. 2017. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 2 (1)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Cenderawasih.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Investasi dan Produktivitas Hutan Produksi.
- Kurniawan A. 2008. Peranan Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Temanggung. *Skripsi*. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret.
- Kusumawati L dan Wiksuana IGB. 2018. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Unud Vol. 7 (5)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Mala VSN, Suyadi B dan Sedyti RN. 2017. Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Jember.
- Misriadi. 2013. Rencana Bisnis Agroforestry KPHP Limau Unit VII – Hulu Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sarolangun.
- Mufid MK. 2016. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan. Intitut Pertanian Bogor.
- Nasrum M. 2012. *Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya*. Penerbit INA-Rxiv
- Nurrochmat. 2008. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto. Makalah disampaikan Pada Rakor Mitra Utama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008: “PDRB Hijau dan Bisnis Kehutanan”. Hotel Kedaton, Bandung 23 Juli 2008.
- Pawitno. 2003. Kontribusi Pendapatan Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Di Papua. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan. Universitas Negeri Papua.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun (RPJMD) Tahun 2017-2022.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 2012. Peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor 14 tahun 2012 tentang pajak sarang burung walet.

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan. Jakarta.
- Prasetyo WA, Budiani ES dan Arlita T. 2017. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Jom Faperta Vol. 4 (1)*. Fakultas Pertanian. Universitas Riau.
- Pratiwi DS. 2010. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan. Intitut Pertanian Bogor.
- Rahmawaty. 2004. Hutan: Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat. *Jurnal USU Digital Library*. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.
- Rahmi A. 2013. Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Safangatun FI. 2011. Peranan Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Cilacap. *Skripsi*. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret.
- Samsu, Suramenggala DI, Komarudin H dan Ngau Y. 2005. *Dampak Desentralisasi Kehutanan Terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Tata Ruang (Studi Kasus Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur)*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Suhendang E. 2013. *Pengantar Ilmu Kehutanan Edisi Kedua*. Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

- Suparmoko M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suseno TW. 1990. *Indikator Ekonomi "Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia"*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tindaon O. 2010. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Di Jawa Tengah (Pendekatan Demometrik). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Wicaksono R. 2010. Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Rill, Suku Bunga Rill, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar Di Indonesia Tahun 1990 2008. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.